

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Teori Efektivitas Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif yakni suatu hal yang ada efeknya (pengaruhnya, akibatnya, kesannya) semenjak diberlakukannya suatu Undang-Undang atau peraturan.¹⁷ Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam encapai suatu tujuan. Efektivitas adalah pengukuran yang berarti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Hukum dapat berperan dalam mengubah pola pemikiran masyarakat dari pola pemikiran yang tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional atau modern. Efektivikasi hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif.

Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka harus mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya.¹⁸

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2002. Jakarta. Balai Pustaka. Hal. 284.

¹⁸ Achmad Ali. 2009. *Teori Hukum Dan Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang-Undang*. Jakarta. Penerbit Kencana. Hal 375.

Menurut Soerjono Soekanto tolak ukur efektivitas dalam penegakan hukum terdapat lima hal, yakni :¹⁹

1. Faktor Hukum

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja²⁰.

2. Faktor Penegakan Hukum

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.²¹

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyeraskan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.²²

¹⁹ Soerjono Soekanto. 2007. *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 5

²⁰ *Ibid.* Hal. 8

²¹ *Ibid.* Hal. 21

²² *Ibid.* Hal. 37

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsikonsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Maka, kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku. Disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundangundangan), yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum perundangundangan tersebut dapat berlaku secara aktif.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolok ukur dari efektifitas penegakan hukum. Dari lima faktor penegakan hukum tersebut faktor penegakan hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya. Hal ini disebabkan oleh baik undang-undangnya disusun oleh penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat luas.

1.2 Pengertian Tentang Narkotika

1.2.1 Menurut Undang-Undang Narkotika

Didalam Undang-undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, pada Pasal 1 ayat, 1 dan ayat 2 disana sudah dijelaskan apa yang dimaksud dengan Narkotika dan prekursornya.²³

“Pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman bukan tanaman, baik secara sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran hilangnya rasa, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan”.

“Pasal 1 ayat 2 dijelaskan mengenai prekursor narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang”

1.2.2 Menurut Pendapat Ahli

Narkotika adalah merupakan zat atau bahan aktif yang bekerja pada sistem saraf pusat (otak), yang dapat menyebabkan penurunan sampai hilangnya kesadaran dari rasa sakit (nyeri) serta dapat menimbulkan ketergantungan atau ketagihan.²⁴

Secara etimologis Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu “narko” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari perkataan narcotic yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong), bahan-bahan pembius dan obat bius.²⁵

²³ Undang-undang No 35 tahun 2009, *tentang Pengertian Narkotika*.

²⁴ Ibid, hal 14

²⁵ Fransiska Novita Eleanora. 2011. Bahaya Penyalahgunaan Narkotika Serta Usaha Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis). Jakarta. Jurnal Hukum. Vol XXV. No.1. Fakultas Hukum Universitas MPU Tantulur Jakarta. Hal 441.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengistilahkan Narkotika atau narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang. Pengertian Narkotika menurut *Smith Kline dan French Clinical Staff* membuat definisi sebagai berikut.²⁶

“Narcotics are drugs which produce insensibility or stupor due to their depressant effect on the central system. Include in this definition are opium, opium derivatives (morphine, codein, heroin) and synthetic opiates (meriipidin dan methadon).”

Menurut B. Bosu dalam buku Hari Sasangka , narkotika adalah sejenis zat yang apabila dipergunakan atau dimasukkan kedalam tubuh si pemakai akan menimbulkan pengaruh-pengaruh seperti berupa menenangkan, merangsang dan menimbulkan khayalan atau halusinasi.²⁷

Berdasarkan dari berbagai definisi diatas penulis dapat mengambil kesimpulan terkait pengertian narkotika adalah zat (obat-obat) candu, ganja, kokain zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari bahan-bahan tersebut yakni *morphin, cocain, dan heroin* yang dapat menghilangkan rasa nyeri, dapat menimbulkan ketidaksadaran atau pembius dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi syaraf sentral yang

²⁶ Ibid

²⁷ Dalam Hari Sasangka. 2008. Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana. Bandung. Mandar Maju. Hal.135

mengakibatkan pemakai mengalami rasa ketenangan, merangsang dan halusinasi.

1.3 Tinjauan Tentang Penyalahgunaan Narkotika

1.3.1 Pengertian Penyalahgunaan Narkotika

Kata penyalahgunaan berasal dari dua kata yaitu “salah” dan “guna” yang diberi awalan “pe” dan akhiran “an” yang dapat diartikan sebagai penyelewengan penggunaan obat yang bukan untuk tujuan medis atau pengobatan, dengan kata lain penggunaan obat tidak sesuai dengan indikasinya. Penyalahgunaan (*drug abuse*) adalah penggunaan suatu zat secara berlebihan atau tidak tepat, misalnya alkohol atau obat-obat lain yang dapat mengganggu atau meningkatkan risiko gangguan kesehatan.

Menurut Dadang Hawari penyalahgunaan Narkotika adalah suatu kondisi yang dapat dikonseptualisasikan sebagai suatu gangguan jiwa, yaitu gangguan mental dan perilaku (*mental and behavior disorder*) akibat penyalahgunaan narkotika.²⁸

Selain itu penyalahgunaan narkotika merupakan suatu pola penggunaan yang bersifat patogolik, berlangsung dalam jangka waktu tertentu dan menimbulkan gangguan fungsi sosial dan okupasional (kelompok yang muncul karena semakin mudarnya fungsi kekerabatan, dimana kelompok ini timbul karena anggotanya

²⁸ Dadang Hawari. 2003. United National Office on Drugs and Crime. Balai Penerbit FKUI. Hal 12

memiliki pekerjaan yang sejenis. Contohnya, kelompok profesi, seperti asosiasi sarjana farmasi, ikatan dokter Indonesia, dan lain-lain).²⁹

“Menurut Pasal 1 ayat 15 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika mendefinisikan terkait Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.”

Menurut definisi diatas penulis dapat menyimpulkan yang dimaksud dengan penyalahgunaan narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika dengan tanpa hak (tanpa pengawasan dari dokter) dan melawan hukum (tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang) yang dapat menimbulkan ketergantungan.

Dengan semakin meningkatnya peredaran dan penyalahgunaan narkotika pada saat ini, maka upaya penanggulangannya tidak dapat semata-mata dibebankan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum saja, akan tetapi juga merupakan tugas dan tanggung jawab kita bersama.

1.4 Bentuk – Bentuk Saksi Bagi Pecandu Narkotika

Di dalam Undang-Undang Narkotika juga sudah ditentukan mengenai perbuatan- perbuatan apa saja yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana dalam *Buprenorfinopiat* dan *Etilmorfina*. Berdasarkan cara pembuatannya, narkotika dibedakan ke dalam hubungannya dengan narkotika. Perbuatan

²⁹ Edy Karsono. 2004. *Mengenal Kecanduan Narkoba dan Minuman Keras*. Mandar Maju. Bandung. Hal 11.

tersebut dapat disebut dengan tindak pidana narkoba yang dapat berupa penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba. Berdasarkan Pasal 1 ayat 6 Undang No 35 Tahun 2009 yang berbunyi:

“Peredaran Gelap dan Prekursor Narkoba adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba. Selain itu dalam Pasal 35 mendefinisikan Peredaran Narkoba meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkoba, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.”

Dalam Undang-undang Narkoba telah mengatur tentang ketentuan pidana bagi siapa saja yang dapat dikenakan pidana beserta denda yang harus ditanggung oleh penyalahguna narkoba atau disebut sebagai pelaku pidana narkoba. Yang mana dalam peredaran gelap tersebut berkaitan dengan:

1. Produsen Narkoba
2. Bandar Narkoba
3. Kurir Narkoba
4. Pengedar Narkoba
5. Pecandu Narkoba
6. Penyalahguna Narkoba ³⁰

Menurut Dadang Hawari penyalahgunaan narkoba adalah suatu kondisi yang dapat dikonseptualisasikan sebagai suatu gangguan jiwa, yaitu gangguan

³⁰ Undang – undang No 35 tahun 2009

mental dan perilaku (*mental and behavior disorder*) akibat penyalahgunaan narkoba.³¹

“Menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pengertian Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum”

Ketentuan pidana narkoba (bentuk tindak pidana yang dilakukan serta ancaman sanksi pidana bagi pelakunya) diatur dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tercantum lebih dari 30 pasal, yaitu Pasal 111 s.d Pasal 142 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.³²

“Pasal 111 s/d pasal 112, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, ata, menyiadaka, narkorika golongan I dalam bentuk tanaman dan bukan tanama, akan dikenakan Pidana penjara anatar 4 tahun sampai 12 tahu, dan denda antara Rp 800 juta s/d Rp 8 miliar”

“Pasal 115, Mengirim, mengangkut atau transito narkoba golongan I, Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara antara 5 tahun sampai 20 tahun. Dan dikenakan denda antara Rp 1 miliar s/d Rp 10 miliar”

“Pasal 113, menyatakan memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkoba golongan I, akan dikenakan pidana penjara 5 tahun sampai 15 tahun, dan denda antara Rp 1 miliar s/d 10 miliar”

³¹ Dadang Hawari. 2003. *United National Office on Drugs and Crime*. Balai Penerbit FKUI. Hal 12

³² Chapin J.P. 2009. *Kamus Lengkap Psikologi Terjemahan Kartini Kartono*. Jakarta. Rajawali Pers. Hal. 9

“Pasal 116, menggunakan narkoba golongan I terhadap orang lain, akan dikenakan pidana penjara antara 5 tahun sampai 15 tahun. Dan denda antara Rp 1 miliar s/d Rp 10 miliar”

“Pasal 117, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan III, dikenakan pidana 3 tahun sampai 10 tahun, dan denda antara Rp 600 juta s/d Rp 5 miliar”

“Pasal 118, memproduksi, mengimpor, mengeksport, atau menyalurkan narkoba golongan III, dikenakan pidana penjara antara 4 tahun sampai 12 tahun, dengan denda antara Rp 800 juta s/d Rp 8 miliar”

“Pasal 119, menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara jual beli narkoba golongan III, dikenakan pidana antara 4 tahun sampai 12 tahun dan denda antara Rp 800 juta s/d Rp 8 miliar”

Berdasarkan Pasal-pasal, diatas menunjukkan bahwa UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah mengatur jenis sanksi pidana yang sangat berat terhadap pelaku tindak pidana narkoba. Hal itu terlihat dari adanya jenis pidana mati, pidana penjara seumur hidup, pidana penjara maksimum 20 tahun, pidana kurungan dan pidana denda yang jumlahnya ratusan juta hingga miliaran rupiah, serta hukuman alternatif yang diberikan kepada pengguna atau korban penyalahgunaan narkoba, yaitu asisment yang dilakukan oleh pihak BNN untuk mendapatkan proses rehabilitasi medis.³³

³³ Esti Aryani. 2011. *Penyalahgunaan Narkoba dan Aturan Hukumnya. Jurnal Hukum*. Vol. IX. Fakultas Hukum. Universitas Unisri. Hal. 93-94.

1.5 Tinjauan Tentang Rehabilitasi

1.5.1 Dasar Hukum Rehabilitasi

Rehabilitasi medis adalah rehabilitasi adalah proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika, yang diperuntukan untuk pengguna atau pecandu yang sudah melalui asisment di Badan Narkotika Nasional dengan tujuan sebagai hukuman alternative untuk para pengguna atau pecandu narkotika. Didalam Undang-undang No 35 Tahun 2009, sudah jelas dan diatur mengenai rehabilitasi medis didalam Pasal 1 butir 17, disana dijelaskan mengenai rehabilitasi medis.

“Pasal 1 butir 17, rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika”

Ketentuan yang menjadi dasar hukum mengenai rehabilitasi medis juga terdapat didalam Pasal 54 Undang-undang Narkotika, disana dijelaskan mengenai kewajiban bagi pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial.³⁴

Selain diatur didalam Undang-undang No 35 Tahun 2009, Pasal 1 butir 17 dan Pasal 54, ketentuan mengenai rehabilitasi medis ini juga tercantum didalam Peraturan Menteri Kesehatan No 46 Tahun 2012 Tentang Petunjuk teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Bagi pecandu,

³⁴ Undang-undang No 35 tahun 2009

Penyalahgunaan dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Yang Dalam Proses Atau Yang telah Diputus oleh Pengadilan.³⁵

Ketentuan yang mengatur tentang rehabilitasi juga terdapat, didalam Pasal 67 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa BNN Melakukan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dengan berbagai kegiatan melalui bidang Pencegahan, Bidang Perberdayaan Masyarakat, bidang rehabilitasi, bidang pemberantasan dan bidang hukum dan kerja sama.³⁶

1.5.2 Tahap-Tahap Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika

1. Tahap rehabilitasi medis (detoksifikasi), tahap ini pecandu diperiksa seluruh kesehatannya baik fisik dan mental oleh dokter terlatih. Dokterlah yang memutuskan apakah pecandu perlu diberikan obat tertentu untuk mengurangi gejala putus zat (sakau) yang ia derita. Pemberian obat tergantung dari jenis narkoba dan berat ringanya gejala putus zat. Dalam hal ini dokter butuh kepekaan, pengalaman, dan keahlian guna memdeteksi gejala kecanduan narkoba tersebut
2. Tahap rehabilitasi nonmedis, tahap ini pecandu ikut dalam program rehabilitasi. Di Indonesia sudah di bangun tempat-tempat rehabilitasi, sebagai contoh di bawah BNN adalah tempat rehabilitasi di daerah Lido (Kampus Unitra), Baddoka (Makassar),

³⁵ Peraturan menteri kesehatan No 46 tahun 2012 (*tentang petunjuk teknis pelaksanaan rehabilitasi medis*)

³⁶ Undang-undang No 35 tahun 2009

dan Samarinda. Di tempat rehabilitasi ini, pecandu menjalani berbagai program diantaranya program therapeutic communities (TC), 12 steps (dua belas langkah, pendekatan keagamaan, dan lain-lain).

3. Tahap bina lanjut (after care), tahap ini pecandu diberikan kegiatan sesuai dengan minat dan bakat untuk mengisi kegiatan sehari-hari, pecandu dapat kembali ke sekolah atau tempat kerja namun tetap berada di bawah pengawasan.

1.5.3 Pengertian Rehabilitasi Menurut Para Ahli

Menurut Dr. Rusk, rehabilitasi adalah self rehabilitation yang artinya keberhasilan dari rehabilitasi tersebut itu tergantung dari motivasi sang penderita dalam mengembangkan potensinya seoptimal mungkin, karena para ahli hanya dapat memberikan petunjuk, bimbingan, kemudahan fasilitas dan mendorong penderita untuk keberhasilan program rehabilitasi yang dijalannya.³⁷

Menurut Renwick dan Friefeld, rehabilitasi adalah suatu kegiatan multidisipliner yang memfungsikan kembali aspek-aspek fisik, emosi, kognisi, dan sosial sepanjang kehidupan individu sehingga mampu melakukan kegiatan diwaktu luang.³⁸

³⁷ Dr. Rusk, *Pengertian Rehabilitasi*, <https://www.seputarpengetahuan.co.id/2016/01/12-pengertian-rehabilitasi-menurut-para-ahli-terlengkap.html>, diakses pada tanggal 14 juli 2019.

³⁸ ibid

Menurut Waddel dan Burton, rehabilitasi merupakan identifikasi dan pengatasan masalah terkait masalah kesehatan, pekerjaan, hambatan personal psikologis ataupun sosial.

1.6 Tinjauan Tentang Remaja

1.6.1 Pengertian Remaja

Didalam kamus besar bahasa Indonesia disana dijelaskan bahwa remaja dimulai “dewasa samapai umur kawin atau sudah bersikap bukan kekanak-kanakan lagi”³⁹

Masa remaja adalah masa peralihan atau transisi perkembangan antara masa kanak-kanak, atau ketika individu tumbuh dari masa anak-anak menjadi individu yang memiliki kematangan. Pada masa tersebut, ada dua hal penting menyebabkan remaja melakukan pengendalian diri. Dua hal tersebut adalah, pertama, hal yang bersifat eksternal, yaitu adanya perubahan lingkungan, dan kedua adalah hal yang bersifat internal, yaitu karakteristik di dalam diri remaja yang membuat remaja relatif ebih bergejolak dibandingkan dengan masa perkembangan lainnya (*storm and stress period*).⁴⁰

Dikemukakan tiga kriteria, yaitu biologis, psikologis, dan sosial ekonomi, sehingga secara lengkap definisi tersebut berbunyi sebagai berikut. Remaja adalah suatu masa di mana:

³⁹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/remaja>, *Pengertian tentang remaja*, diakses pada tanggal 7 September 2019

⁴⁰ S. Wirawan, *Psikologi Remaja*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 23

1. Individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai saat ia mencapai kematangan seksual.
2. Individu mengalami perkembangan psikologis dan pola identifikasi dari kanak-kanak menjadi dewasa.
3. Terjadi peralihan dari ketergantungan sosial-ekonomi yang penuh kepada keadaan yang relatif lebih mandiri.⁴¹

Dalam tahapan perkembangan remaja menempati posisi setelah masa anak dan sebelum masa dewasa. Adanya perubahan besar dalam tahap perkembangan remaja baik perubahan fisik maupun perubahan psikis (pada perempuan setelah mengalami *menarche* dan pada laki-laki setelah mengalami mimpi basah) menyebabkan masa remaja relatif bergejolak dibandingkan dengan masa perkembangan lainnya. Hal ini menyebabkan masa remaja menjadi penting untuk diperhatikan.⁴²

1.6.2 Batasan Usia Remaja

Berdasarkan tahapan perkembangan individu dari masa bayi hingga masa tua akhir menurut Erickson, masa remaja dibagi menjadi tiga tahapan yakni masa remaja awal, masa remaja pertengahan, dan masa remaja akhir. Adapun kriteria usia masa remaja awal pada perempuan yaitu 13-15 tahun dan pada laki-laki yaitu 15-17 tahun. Kriteria usia masa remaja pertengahan pada perempuan yaitu 15-18

⁴¹ WHO (World Health Organization). 1974. *Pengertian Remaja*.

⁴² Yudrik Jahja, *Psikologi Perkembangan*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm, 219

tahun dan pada laki-laki yaitu 17-19 tahun. Sedangkan kriteria masa remaja akhir pada perempuan yaitu 18-21 tahun dan pada laki-laki 19-21 tahun.⁴³

1.7 Pengertian Korban (undang-undang saksi dan korban)

Viktimologi (korban), berasal dari bahasa latin *victima* yang berarti korban dan *logos* yang berarti ilmu. Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban penyebab timbulnya korban dan akibatakibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.⁴⁴

Selain pengertian diatas, pengertian mengenai *victimology* (korban) juga sudah dijelaskan didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (3) Tentang Perlindungan Korban dan Saksi yang berbunyi sebagai berikut: “Korban adalah seseorang yang yang mengalami kerugian baik itu kerugian atau penderitaan secara fisik, atau mental dan/ atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatau tindak pidana”.⁴⁵

Para ahli sependapat dengan undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 mengenai pengertian korban dan saksi, Menurut Muladi korban (*victim*) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui

⁴³ Thalib. 2010. *Pengertian Remaja*.

⁴⁴ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm 43

⁴⁵ Undang-undang Nomor 31 tahun 2014 “*Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*”

perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.⁴⁶

1.8 Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika

Upaya penanggulangan tindak pidana menurut kriminologi, khususnya tindak pidana penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu sebagai berikut:

1. Pre-emptif

Yang dimaksud dengan upaya pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.⁴⁷

2. Preventif

Suatu motto di bidang kesehatan menyatakan bahwa "pencegahan itu lebih baik daripada pengobatan." Bertitik tolak dari pemikiran ini, pertanyaan kita ialah bagaimana upaya masyarakat dapat

⁴⁶ Muladi "pengertian Korban (victim)" <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-korban/14757/2>, Diakses 7 September 2019

⁴⁷ Java Creativity, "Teori-teori Upaya Penanggulangan Kejahatan", <https://telingasemut.blogspot.com/2016/03/teori-teori-upaya-penanggulangan.html>, Diakses 14 juli 2019.

melakukan pengawasan terhadap semua aktivitas warga dan masyarakat agar tidak menyalahgunakan obat-obatan terlarang.

Kata kuncinya yaitu peran serta masyarakat dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan psikotropika, tujuannya ialah bagaimana upaya untuk membangun sistem peradilan sosial tersebut melalui proses belajar. Masyarakat sebagai suatu sistem sosial, yaitu sebagai suatu sistem yang hidup dipastikan akan menghadapi sejumlah masalah dan harus dapat diatasi untuk memungkinkan sistem sosial tersebut bisa melangsungkan kehidupannya.

Dengan demikian penyalahgunaan narkoba dipandang sebagai suatu ancaman dan dipandang akan menghancurkan sistem sosial masyarakat tersebut.

Untuk membentuk masyarakat yang mempunyai ketahanan dan kekebalan terhadap narkoba, pencegahan adalah lebih baik dari pemberantasan, pencegahan penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti pembinaan dan pengawasan dari keluarga, penyuluhan dari pihak yang berkompeten baik di sekolah dan masyarakat, pengajian oleh para ulama, pengawasan tempat-tempat hiburan malam oleh pihak keamanan, pengawasan distribusi obat-obat ilegal, dan melakukan tindakan-tindakan lain yang bertujuan untuk mengurangi atau meniadakan kesempatan terjadinya penyalahgunaan narkoba.

3. Represif

Menindak dan memberantas penyalahgunaan narkoba melalui jalur hukum, yang dilakukan oleh para penegak hukum atau aparat keamanan yang dibantu oleh masyarakat. Kalau masyarakat mengetahui, harus segera melaporkan kepada pihak yang berwajib, tidak boleh main hakim sendiri.

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (law enforcement) dengan menjatuhkan hukuman. Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang ditanggungnya asangat berat.⁴⁸

4. Kuratif

Bertujuan menyembuhkan para korban, baik secara medis maupun dengan media lain. Di Indonesia sudah banyak didirikan tempat-tempat penyembuhan dan rehabilitasi pecandu narkoba, seperti

⁴⁸ Handar Subandi Bahtiar, "*Upaya Penanggulangan Kejahatan*", <http://handarsubhandi.blogspot.com/2015/08/upaya-penanggulangan-kejahatan.html>, Diakses pada 14 juli 2019.

yayasan atau pesantren. Upaya kuratif merupakan upaya untuk memulihkan kondisi korban penyalahguna narkoba agar kembali pulih seperti sediakala, yaitu dengan cara menerima laporan bagi masyarakat yang ingin mengikuti rehabilitasi dan memberikan rehabilitasi dalam bentuk rawat jalan.

Menindak dan memberantas penyalahgunaan narkoba melalui jalur hukum, yang dilakukan oleh para penegak hukum atau aparat keamanan yang dibantu oleh masyarakat. Kalau masyarakat mengetahui, harus segera melaporkan kepada pihak yang berwajib, tidak boleh main hakim sendiri.

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang ditanggungnya asangat berat.⁴⁹

⁴⁹ Handar Subandi Bahtiar, “Upaya Penanggulangan Kejahatan”, <http://handarsubhandi.blogspot.com/2015/08/upaya-penanggulangan-kejahatan.html>, Diakses pada 14 juli 2019.